

Analisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan Ekonomi di negara berkembang

Upi Sopiah Ahmad

Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

opisopiahahamad@gmail.com

ABSTRACT

Tax policy plays an important role in developing economies, influencing economic growth through various channels. This research aims to analyze the impact of tax policy on economic growth in developing countries, with a focus on how to find tax policies that are able to encourage inclusive and sustainable economic growth, so that they can improve people's welfare and reduce poverty. Tax policy plays an important role in developing economies show that a well-designed tax policy can encourage economic growth by increasing state income which can then be used for investment in infrastructure and public services. For example, reductions in corporate tax rates in several developing countries have been shown to increase foreign direct investment, which contributes to job creation and increased economic output. However, this research also finds that ineffective or unfair tax policies can hinder economic growth. Taxes that are too high or a complex tax system and tax corruption can reduce incentives for investment and business, and result in income inequality. This study concludes that to maximize the positive impact of tax policy on economic growth, developing countries need to implement a simple, transparent and fair tax system. In addition, strengthening tax administration and increasing tax compliance is also key to ensuring that tax revenues can be used effectively for economic development. The proposed policy recommendations include tax reform that focuses on increasing efficiency and fairness, as well as efforts to improve infrastructure to increase welfare.

Keywords: *Impact, tax policy, economic growth, developing countries*

ABSTRAK

Kebijakan pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara berkembang, memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dengan fokus pada bagaimana menemukan kebijakan pajak yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan pajak dalam perekonomian negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak perusahaan di beberapa negara berkembang telah terbukti meningkatkan investasi

asing langsung, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pajak yang tidak efektif atau tidak adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang kompleks dan korupsi pajak dapat mengurangi insentif bagi investasi dan usaha, serta mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, negara berkembang perlu menerapkan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil. Selain itu, penguatan administrasi pajak dan peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan ekonomi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi reformasi perpajakan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan keadilan, serta upaya untuk memperbaiki infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci : *Dampak, kebijakan pajak, pertumbuhan ekonomi, negara berkembang*

PENDAHULUAN

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering kali kompleks dan beragam. Kebijakan pajak yang tidak tepat dapat menghambat investasi, mengurangi daya saing ekonomi, dan menimbulkan distorsi pasar. Sebaliknya, kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Di negara berkembang, tantangan dalam implementasi kebijakan pajak sering kali lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Keterbatasan administrasi pajak, ketidakpatuhan pajak, dan ekonomi informal yang besar menjadi beberapa hambatan utama. Selain itu, negara berkembang sering kali menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan pemerintah dan keinginan untuk tidak membebani pelaku ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Dengan memahami bagaimana kebijakan

pajak mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam analisis ini, berbagai faktor akan diperhatikan, termasuk struktur pajak, tingkat kepatuhan pajak, dan kondisi ekonomi makro. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi studi kasus dari beberapa negara berkembang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan kebijakan pajak yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Metodologi

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada, dalam konteks ini kajian tentang dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang utama dalam penelitian ini. Kajian ini menitik beratkan pada bagaimana pengaruh kebijakan kenikmatan pajak terhadap perekonomian negara berkembang, teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan Pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema pajak dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebagai instrument. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang serta imbas kepada perekonomian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan sumbangan warga negara terhadap anggaran negara sesuai dengan undang-undang untuk menunjukkan kesetiaan dan partisipasinya dalam pembiayaan negara dan pembangunannya (Syarifudin 2018). Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk administrasi publik dan biaya pembangunan. Saat ini kontribusi

pajak terhadap APBN masih tetap berlaku di Indonesia. Pada tahun 2016, APBN mencapai Rp 2,3 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1,45 triliun menunjukkan pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memerlukan mekanisme hukum yang mengatur pemungutan pajak guna mempertahankan prinsip pemerataan.

Menurut Profesor Dr. Roochmat Sumitro “Pajak adalah sumbangan rakyat terhadap anggaran pemerintah, yang dapat dinyatakan dengan benar dan menurut undang-undang (dapat dilaksanakan) tanpa ada tindakan lain, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara” (Meliala 2008). Bagi suatu negara, pajak merupakan sumber pendapatan penting dan juga sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Digunakan untuk mendistribusikan pendapatan, menstabilkan perekonomian, dan mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Satriya 2024):

1. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sedangkan untuk pembayaran pajak, pelanggaran pemerintah tidak dapat diperiksa (tidak ada biaya langsung yang ditanggung wajib pajak).
3. Pajak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui produksi nasional.

Jika melihat klasifikasi pajak, ada beberapa jenis pajak yang dibagi berdasarkan jenis, bentuk, dan lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut (Taufik 2022):

1. Jenis-jenis pajak menurut kelompoknya.

Menurut kelompok pajaknya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak langsung.

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipotong atau dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak subyektif

Pajak subyektif merupakan pajak yang didasarkan pada suatu tujuan, yaitu memusatkan perhatian pada keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak sasaran

Pajak sasaran adalah pajak yang terjadi dengan sengaja tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan Barang Mewah.

3. Jenis-jenis Badan Pemungut Pajak

Pajak dibagi menjadi pajak nasional dan pajak daerah tergantung pada lembaga pemungutnya.

a. Pajak Federal

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai gedung-gedung pemerintah. Contoh pajak pemerintah:

1) Pajak yang dipungut oleh Komisioner Pelayanan Pajak Nasional, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), materai dan perdagangan.

2) Pajak yang dipungut oleh Layanan Bea Cukai Korea.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara bagian, kabupaten, atau kota. Pengumpulan dilakukan sesuai dengan peraturan setempat, dan pendapatannya digunakan untuk membiayai kebutuhan perumahan setempat.

1) Jenis pajak pemerintah

a) Pajak Mobil adalah pajak atas kepemilikan dan mengemudikan mobil.

- b) Pajak peralihan kepemilikan kendaraan adalah pajak atas peralihan kepemilikan kendaraan berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam satu transaksi, atau dengan cara yang diakibatkan oleh penjualan, pemindahtanganan, sumbangan, warisan, atau penghasilan usaha.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan adalah pajak atas penanganan bahan bakar untuk mobil.
 - d) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak rokok adalah pajak yang dibayarkan oleh pemerintah atas pajak konsumsi tembakau.
- 2) Jenis pajak kabupaten/kota.
- a) Pajak hotel
Pajak hotel dikenakan atas semua layanan yang disediakan oleh hotel untuk pembayarannya, dan perusahaan hotel adalah orang perseorangan atau badan hukum yang membayar layanan hotel tersebut.
 - b) Pajak restoran
Subyek pajak restoran adalah segala jasa yang diberikan untuk pembayaran di suatu restoran, subjek pajak restoran adalah orang perseorangan atau organisasi yang membayar jasa restoran, pajak restoran dibayar oleh pengelola restoran, dan tarif pajaknya ditetapkan. sebesar 10%.
 - c) Pajak hiburan.
Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas hiburan. Hiburan adalah suatu jenis pertunjukan, tontonan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan berbayar. Subjek pajak hiburan adalah semua hiburan, dan pajaknya dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha yang menonton dan menikmati hiburan.

- d) Pajak atas periklanan, Iklan adalah segala benda, alat atau media yang digunakan untuk tujuan komersial, menurut struktur dan sifat fisiknya, untuk memperkenalkan, menyarankan atau mempromosikan barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar oleh masyarakat di suatu tempat, tetapi : ditanamkan . oleh pemerintah Pengusaha Kena Pajak adalah orang yang menyiapkan iklan dan Pengusaha Kena Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan iklan tersebut. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- e) Pajak tenaga listrik adalah pajak atas pengurangan energi listrik yang dihasilkan secara mandiri atau diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak atas batuan mineral dan nonmineral adalah pajak atas kegiatan pengambilan batuan mineral dan bahan galian dari sumber daya alam yang ada di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak kendaraan adalah pajak yang dipungut atas kendaraan luar negeri yang merupakan usaha utama dan penunjang, termasuk jasa angkutan, dimana parkir adalah bentuk penempatan kendaraan dalam waktu sementara.
- h) Pajak atas air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Air tanah adalah air yang terdapat pada tanah atau formasi batuan di bawah permukaan bumi.
- i) Pajak sarang burung bangau adalah pajak atas pemungutan dan pemanfaatan sarang burung bangau.
- j) Pajak bumi dan pajak kota adalah pajak atas tanah dan bangunan milik orang pribadi dan badan hukum. Namun, wilayah yang digunakan untuk pertanian, kehutanan, dan pertambangan tidak termasuk. Permukaan daratan adalah permukaan bumi yang meliputi daratan, perairan, pedalaman, dan lautan suatu wilayah/kota. Instalasi adalah suatu struktur

teknis yang ditempatkan atau dipasang secara permanen pada daratan, perairan, pedalaman, dan lautan.

- k) Pajak real estat adalah jenis pajak yang dipungut ketika seseorang atau suatu badan memperoleh tanah dan/atau real estat melalui suatu peristiwa atau tindakan hukum (penguasa undang-undang), yang dapat berbicara lagi. Dan pajak BPHTB dikenakan tidak hanya pada saat tanah dijual, tetapi juga pada saat hak atas tanah dan/atau bangunan diperoleh melalui warisan, hibah, atau pengalihan tanah.

Tujuan perpajakan tidak lepas dari tujuan pemerintah. Oleh karena itu, tujuan pajak harus sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu di bawah tujuan pemerintah. Konsep perpajakan dan konsep pemerintahan berakar pada konsep masyarakat. Tujuan dari masyarakat ini adalah negara dan ide-idenya. Oleh karena itu, tujuan perpajakan tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya. Oleh karena itu, selain digunakan untuk pembangunan, pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya juga digunakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan yang dapat dicapai melalui implementasi fiskal adalah mencapai langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian negara, yaitu (Lubis 2010):

1. Batasi konsumsi untuk mengalihkan sumber daya dari konsumsi ke investasi.
2. Mendorong tabungan dan investasi.
3. Memindahkan kekayaan dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, memungkinkan penanaman kekayaan dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, dan memfasilitasi penanaman modal pemerintah.
4. Ubah model investasi.
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi.
6. Konsolidasikan keseimbangan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada tren peningkatan pendapatan sebagai akibat dari peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang membaik seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan manusia (Rapanna 2017).

Menurut para ahli, pertumbuhan ekonomi didefinisikan seperti kemampuan jangka panjang dalam peningkatan pemerintah untuk memfasilitasi berbagai bahan ekonomi untuk masyarakatnya, dan kapabilitas muncul berdasarkan manajemen dan kemajuan teknologi. dan koreksi pikiran.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator kemajuan dan pembangunan daerah. Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi diakibatkan aspek *intern* dan *eksternal*. Negara dengan pendapatan meningkat karena peningkatan produksi barang dan jasa. Jika memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, bukan berarti setiap negara ingin melihat progres ekonomi yang selalu memuncak pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, suatu negara harus berusaha memperbanyak bahan-bahan yang diproduksi untuk meningkatkan jumlah barang atau jasa yang dipasarkan kepada masyarakat.

Perkembangan ekonomi mengacu pada peningkatan finansial yang terjadi dalam proses produksi barang dan jasa. Perkembangan di sebuah negara meliputi peningkatan produksi industri dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana serta perkembangan sektor layanan serta meningkatnya konsumsi barang-barang bergengsi. Ukuran yang biasanya dipakai untuk menunjukkan perkiraan seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai sebuah negara dapat diukur dari seberapa cepat pendapatan nasionalnya tumbuh. (Wau 2022).

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar sebuah angka, tapi juga cerminan vitalitas dan keberhasilan suatu negara dalam berinteraksi dengan pasar global. Mengeksplorasi performa ekonomi adalah krusial dan sungguh vital untuk menggali hasilnya secara

komprehensif. Kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah. Suatu ekonomi dianggap berkembang ketika peningkatan produksi barang dan jasa terlihat jelas dari tahun ke tahun. Oleh itulah sebabnya, pertumbuhan ekonomi tergantung pada sejauh mana

aktivitas ekonomi menciptakan peningkatan pemasukan atau kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan. Naik pesat meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah tanda bahwa perekonomian sedang berkembang secara positif negeri atau daerah itu berkembang dengan gemilang.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan dengan tingkat kesejahteraan warganya, pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (Amalia 2022):

1. Faktor SDM

SDM ialah proses pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan, SDM juga merupakan suatu patokan dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya.

2. SDA

Dalam pelaksanaan proses pembangunan di suatu negara berkembang seperti Indonesia relatif bergantung pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan ekonomi sendiri tidak dapat di harapkan dari sumber daya alam saja, sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam pembangunan ini, dimana manusia bisa mengolah SDA yang ada. Hasil tanah, sumber daya mineral, pertambangan, hasil hutan, dan sumber daya kelautan merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola.

3. Pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan

Kecepatan prosedur pembangunan di dorong oleh kemajuan dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dimana pekerjaan yang dilakukan secara manual saat ini sebagian besar sudah di gantikan dengan kecerdasan buatan, perubahan pola kerja harus mempengaruhi aspek-aspek seperti: Kapasitas dan mutu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dari pembangunan ekonomi yang berkualitas.

4. Faktor budaya

Pembangunan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor ini dalam proses pembangunan memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggeraknya, selain itu faktor ini juga memiliki hambatan dalam proses pembangunan. Sikap tanpa pamrih, produktif, cerdas, jujur, dan tekun merupakan budaya yang dapat mendorong kemajuan.

5. Unsur sumber daya modal

Sumber daya finansial sangat diperlukan agar masyarakat mampu mengolah bahan baku yang bersumber dari alam, dan kualitas teknologi serta ilmu pengetahuan dapat meningkat. Dalam meningkatkan keuntungan pembangunan ekonomi kerajinan tangan sangat diperlukan seperti membuat benda hias, sehingga pembangunan tersebut dapat dikembangkan dan prosesnya dilancarkan. Tingkat pertumbuhan digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi akibat perkembangan suatu negara, pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur standar hidup suatu populasi. Ketika pendapatan per kapita meningkat, standar hidup dan produktivitas penduduk juga meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bidang penelitian yang telah lama dibahas oleh para ekonom. Para ekonom fokus pada isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di setiap negara. Dari pemikirannya muncul teori dan teori pertumbuhan ekonomi. Keempat teori pertumbuhan ekonomi tersebut adalah (Haryadi 2020):

1. Menurut pandangan para ekonom klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi empat faktor yaitu:
 - a. Total populasi
 - b. Besaran kekayaan
 - c. Lahan yang luas dan sumber alam melimpah.
 - d. Kemajuan teknologi dalam masyarakat.

Menurut pandangan klasik, hukum penurunan harga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi penting menekankan peran perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa wirausaha merupakan kelompok yang senantiasa melakukan inovasi

dalam perekonomian, dan inovasi tersebut memerlukan investasi. Menurut Schumpeter, investor dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Investor swasta
 - b. Investor berpengaruh. Investasi ini akan membangun perekonomian.
3. Dalam menganalisis permasalahan pertumbuhan ekonomi, tujuan Harrod-Doma adalah menjelaskan syarat-syarat jangka panjang yang harus dipenuhi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Analisis Harrod-Domar menggunakan model berikut:
- a. Kapasitas maksimum harus di capai untuk modal barang.
 - b. Pendapatan nasional berasal dari tabungan.
 - c. Terdapat rasio yang konstan dari *output*.
 - d. Pendapatan nasional sama dengan sektor ekonomi.
4. Teori pertumbuhan neoklasik merupakan teori yang memiliki sudut pandang berbeda dari sisi penawaran. Pertumbuhan ekonomi bukanlah bergantung hanya dalam peningkatan modal dan tenaga kerja saja pada perkembangan berbagai hal, tetapi yang sangat penting di perhatikan yaitu kemajuan teknologi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan pekerja, dan juga perusahaan dapat mengadakan sebuah seminar atau pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pajak yang telah diterapkan (Sihombing 2020):

1. Menurunkan tarif pajak perusahaan.
Menggabungkan perusahaan dan menyediakan kemampuan pengembangan bisnis. Ada insentif bagi wajib pajak untuk mengklasifikasikan sahamnya dan menjual 40% sahamnya dengan harga premium. Tarif umum akan turun dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi 20% pada tahun 2022 hingga 2023. Masuk ke perusahaan publik tarif PPH 3% lebih rendah dari tarif harian. Persyaratan khusus yang ditetapkan PP adalah 19% pada tahun 2020 dan 2021 dan 17% pada tahun 2022 ke tahun berikutnya.
2. Pengelolaan perpajakan atas transaksi melalui sistem elektronik

Untuk menjamin keadilan dan kesetaraan, kami mengenakan pajak terhadap aktivitas bisnis yang tumbuh berdasarkan batasan transaksi tradisional yang dilakukan secara tatap muka. Entitas yang diatur adalah:

- a. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dan jasa.
 - b. Pengenaan PPN pajak atas transaksi elektronik, tidak ditandai badan pajak luar negeri yang memenuhi persyaratan keberadaan *real estat* melakukan transaksi melalui sistem elektronik (PMSE), tindakan lainnya diatur oleh undang-undang federal dan kementerian.
3. Perpanjangan Masa Pengajuan Wajib Pajak dan Penetapan DJPM emberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak dan DJP dalam memenuhi kewajibannya. Bagi wajib pajak masa banding bisa memakan waktu hingga 9 bulan. Untuk DJP Durasi penyelesaiannya yaitu:
- a. Klaim kompensasi harus ditinjau dan dapat memakan waktu hingga 18 bulan.
 - b. 18 bulan untuk mengklaim.
 - c. Kami meminta sanksi administratif dikurangi/dihapuskan menjadi 12 bulan.
 - d. Dimungkinkan untuk mengajukan pengurangan/pembebasan pajak atau pembatalan pendapatan rekening selama 12 bulan. Pada dasarnya, waktu penyelesaian tagihan utama telah diperpanjang 1 bulan dari 1 menjadi 2 bulan.

4. Pengenalan Sistem Pengungkapan Sukarela (PPS)

PPS adalah skema yang memungkinkan wajib pajak untuk menyatakan kewajiban perpajakannya tidak terpenuhi dengan membayar PPh dalam laporan harta kekayaan wajib pajak. Melalui inisiatif ini, pemerintah mengusulkan kebijakan tarif pajak minimum bagi investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, yaitu transformasi sumber daya alam (SDA) dan sektor energi baru.

Kebijakan tersebut akan tertuang dalam UU 7/2021 tentang Pendaftaran UndangUndang Perpajakan (HPP) selama enam bulan ke depan, hingga 30 Juni 2022. Nanti juga akan ditetapkan bahwa Kementerian Keuangan menawarkan PPS sebagai wadah bagi wajib pajak untuk menyatakan kewajiban mereka. Anda akan membayar pajak yang belum

Anda bayar dengan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang ada dalam surat pernyataan properti.

Selain kebijakan diatas ada beberapa kebijakan lagi tentang pajak yang dibuat oleh pemerintah yaitu sebagai berikut (Mustaqiem 2014):

1. Kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka kenaikan tarif pajak dan pemenuhan kebutuhan anggaran APBN.
2. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, lingkungan investasi dan daya saing perusahaan nasional.
3. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong industri bawah tanah.
4. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu dan eksternalitasnya yang merugikan.
5. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempromosikan undang-undang perpajakan.
6. Kebijakan perpajakan internasional bertujuan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan menghilangkan penghindaran pajak.
7. Kebijakan fiskal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah, Tantu dari kebijakan dia atas ada dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, jika membahas tentang dampak kebijakan ini, ada dua dampak yang akan terjadi dari kebijakan diatas yaitu dampak positif dan dampak negatif yang akan dirincikan satu persatu di bawah ini (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak 2016):

1. Dampak positif
 - a. Menurut tarif pajak perusahaan
Penurunan tarif pajak badan dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga meningkatkan laba perusahaan dan memperbaiki kinerja keuangan.

Perusahaan yang dikenakan tarif pajak efektif yang tinggi memiliki insentif lebih banyak untuk mengajukan hutang, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi UMKM yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.

b. Pengelolaan perpajakan atas transaksi melalui sistem elektronik.

Pengelolaan perpajakan melalui sistem elektronik meningkatkan kemudahan dalam pengumpulan pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak negara. Sistem elektronik memudahkan transaksi dan pengumpulan pajak, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perpajakan. Penggunaan e-commerce oleh UMKM meningkatkan kinerja mereka karena memudahkan penjualan dan pengumpulan pajak.

c. Perpanjangan masa pengajuan wajib pajak dan penetapan.

Perpanjang masa pengajuan wajib pajak dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena memberikan waktu yang lebih luas untuk mengajukan pajak dan mengurangi biaya pajak. Penetapan masa pengajuan wajib pajak yang lebih luas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi UMKM yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah. Perpanjang masa pengajuan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak negara karena memberikan waktu yang lebih luas untuk mengumpulkan pajak.

d. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela.

Pengenalan sistem pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada investor dan stakeholders. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemerintah dan pajak. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak negara karena memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemerintah dan pajak.

2. Dampak negatif

a. Menurunkan tarif pajak perusahaan.

Penurunan tarif pajak tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, karena sebagian perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi laba yang diperoleh. Penurunan tarif pajak tidak berpengaruh pada sektor-sektor ini karena penerimaan pajak dari sektor-sektor ini relatif kecil. Penurunan tarif pajak dapat menyebabkan perusahaan go public tidak dapat memperoleh laba secara maksimal, sehingga menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

b. Pengelolaan perpajakan atas transaksi melalui sistem elektronik.

Perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan sistem elektronik, sehingga mengurangi penerimaan pajak negara. Sistem elektronik memerlukan teknologi yang stabil dan efektif, sehingga ketergantungan pada teknologi dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan. Pengelolaan perpajakan melalui sistem elektronik memerlukan infrastruktur yang baik dan teknologi yang tepat, sehingga kesulitan dalam pengelolaan dapat terjadi jika infrastruktur tidak memadai.

c. Perpanjangan masa pengajuan wajib pajak dan penetapan.

Perpanjang masa pengajuan wajib pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak karena memberikan waktu yang lebih luas untuk mengajukan pajak dan mengurangi biaya pajak. Penetapan masa pengajuan wajib pajak yang lebih luas dapat menyebabkan keterlambatan pajak, sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Perpanjang masa pengajuan wajib pajak tidak berpengaruh pada sektor-sektor ini karena penerimaan pajak dari sektor-sektor ini relatif kecil.

d. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela.

Pengenalan sistem pengungkapan sukarela dapat menyebabkan penghindaran pajak karena memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemerintah dan pajak. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela dapat menyebabkan keterlambatan pajak karena memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemerintah dan pajak. Pengenalan sistem pengungkapan sukarela tidak berpengaruh pada sektor-sektor ini karena penerimaan pajak dari sektor-sektor ini relatif kecil.

Selain dampak positif dan dampak negatif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak kebijakan pajak juga dibagi menjadi dua yaitu dampak kebijakan

secara langsung dan dampak kebijakan tidak langsung, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut (Taufik 2018):

1. Dampak langsung kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi
 - a. Stabilisasi Harga: Pajak dapat digunakan untuk mengontrol inflasi dengan menaikkan tarif pajak atau menghapus insentif pajak tertentu, mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis.
 - b. Pengaruh terhadap Investasi: Pajak yang tepat dapat mendorong pertumbuhan bisnis dengan mendorong pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - c. Distribusi Pendapatan: Pajak yang tepat dapat mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis.
 - d. Pengaruh terhadap Konsumsi: Konsumsi dipengaruhi negatif oleh pajak PPh dan PPN, yang pada gilirannya berdampak positif pada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
 - e. Pengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur: Pembiayaan untuk proyek pemerintah seperti pembangunan infrastruktur didanai melalui pajak yang diterima pemerintah. Ini meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan aktivitas ekonomi negara.
Secara keseluruhan, kebijakan pajak yang tepat memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengontrol inflasi, mendorong investasi, menjamin pemerataan pendapatan, dan membangun infrastruktur.
2. Dampak tidak langsung kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi
 - a. Pengaruh pada Konsumsi: Pajak dapat memengaruhi konsumsi masyarakat. Kenaikan pajak dapat mengurangi pendapatan disposibel dan mengurangi konsumsi, yang dapat mengurangi pendapatan nasional. Sebaliknya, penurunan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan pendapatan nasional.
 - b. Pengaruh pada Investasi: Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong investasi, inovasi, dan pembentukan lapangan kerja. Potongan pajak atas penghasilan perusahaan atau

insentif pajak untuk industri tertentu dapat secara strategis mendorong sektor ekonomi tertentu.

- c. Pengaruh pada Inflasi: Inflasi dapat dikontrol dengan pajak. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak untuk mengontrol permintaan agregat ekonomi dalam
- d. situasi di mana inflasi meningkat. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dan menekan inflasi yang berlebihan dengan menaikkan tarif pajak atau menghapus insentif pajak tertentu.
- e. Pengaruh pada Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dapat dibiayai dengan pajak.
- f. Pengaruh pada Pemerataan Pendapatan: Pajak dapat digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara dengan menerapkan sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan pendapatan.

Pajak yang efektif dan adil dapat mengurangi disparitas ekonomi antara orang kaya dan miskin. Mereka juga dapat memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara merata sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap orang. Secara keseluruhan, kebijakan pajak yang cerdas dan terarah dapat memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk dampak pada investasi, konsumsi, pemerataan pendapatan, inflasi, dan pembangunan infrastruktur.

PENUTUP

Di negara berkembang kebijakan pajak memiliki dampak penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pajak yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan pajak yang tidak tepat, seperti pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang rumit, dapat menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, administrasi pajak yang lemah dapat menyebabkan penghindaran pajak dan korupsi, yang mengurangi pendapatan negara dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi

*Analisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan
Ekonomi di negara berkembang*

administrasi pajak, dan memastikan penggunaan yang tepat dari pendapatan pajak di negara berkembang.

Referensi

Abdul Fatah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
Feny Rita Fiantika. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Fitri Amalia. 2022. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: CV Widina Media Utama.

Irwansyah Lubis. 2010. *Mengenali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Marselo Wau. 2022. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.

Moh Taufik. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Mohammad Taufik. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Patta Rapanna. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makasar: CV SAH MEDIA.

Sutarduga Sihombing. 2020. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Kesadaran Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Tulis S Meliala. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Jakarta Selatan: Semesta Media.

Wayan Budi Satriya. 2024. *Konsep Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Yossinomita Haryadi. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan*. Sukabumi: CV Haura Utama.